

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA

Oleh:

CHRISTOPHER JAKUB

Penelitian ini hendak menyelidiki tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah pemungutan pajak atas transaksi jual beli aset kripto yang dalam pelaksanaannya ditemukan juga polemik pengaturan penerapan regulasi pajak terhadap aset kripto, karena aset kripto merupakan aset yang menggunakan sistem dua arah, sehingga regulasi pemungutan pajak atas aset kripto hanya meminimalisir pemilik aset kripto untuk melakukan penggelapan pajak atas aset kripto. Tidak menutup kemungkinan pemilik aset dapat menyamarkan identitas yang sesungguhnya dan juga pada dasarnya aset kripto tidak terikat dengan regulasi perbankan tetapi aset kripto berada di sebuah sistem yang dinamakan *blockchain*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia? dan *Kedua*, Apa saja yang menjadi tantangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak dalam transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia dan *Kedua*, Apa saja yang menjadi tantangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Data penelitian ini diperoleh dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan sebagai Informan dan 2 orang investor aset kripto sebagai responden. Peneliti menggunakan teori kewenangan dan teori justifikasi pemungutan Pajak.

Hasil penemuan menunjukkan bahwa *Pertama*, pemerintah melalui kementerian Keuangan mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Penerapan peraturan ini dinilai kaku dan kurang efisien.

Sehingga di revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang dinilai akan meningkatkan optimalisasi pengungutan pajak. *kedua*, Tantangan yang timbul dalam optimalisasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia adalah anonimitas transaksi *Off-Exchange*, resistensi data dari PPMSE, literasi masyarakat terkait perpajakan yang rendah, dan para investor beranggapan bahwa tarif pajak yang dikenakan aset kripto dinilai masih sangat besar.

Kata Kunci: Pajak, Aset Kripto, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF TAX COLLECTION ON CRYPTO ASSET ELECTRONIC TRANSACTIONS IN INDONESIA

By:

CHRISTOPHER JAKUB

This research aims to investigate the optimization of taxation on electronic transactions involving crypto assets in Indonesia. The background of this research is the taxation of crypto assets trading transactions, which in practice has also led to controversy over the application of tax regulations to crypto assets, because crypto assets are assets that use a two-way system, so that tax regulations on crypto assets only minimize the possibility of crypto assets owners evading taxes on crypto assets. It is possible for asset owners to conceal their true identities, and crypto assets are not bound by banking regulations but are instead located in a system called blockchain. The research questions in this study are: First, how can tax collection in electronic transactions based on crypto assets in Indonesia be optimized? and second, what are the challenges in optimizing tax collection related to electronic transactions based on crypto assets in Indonesia? The objectives of this study are: First, to determine the optimization of tax collection in electronic transactions based on crypto assets in Indonesia and Second, what are the challenges in optimizing tax collection related to electronic transactions based on crypto assets in Indonesia.

The method used in this study is normative and empirical legal research method. Data collection methods were carried out using data examination, data marking, data reconstruction, and data systematization techniques. The research data was obtained from the Directorate of Tax Data and Information as informants and two crypto asset investors as respondents. The researcher used the theory of authority and the theory of tax justification.

The findings show that, first, the government, through the Ministry of Finance, passed Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. The implementation of this regulation is considered rigid and inefficient. Therefore, it was revised with the issuance of Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025

concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions, which is expected to improve tax collection optimization. Second, the challenges that arise in optimizing tax collection on crypto asset transactions in Indonesia are the anonymity of off-exchange transactions, data resistance from PPMSE, low public literacy regarding taxation, and investors perception that the tax rates imposed on crypto assets are still very high.

Keywords: Tax, Crypto Assets, Electronic Transactions.